

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN, PEMAHAMAN STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAH, SISTEM INFORMASI AKUNTANSI KEUANGAN
DAERAH, DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN TERHADAP
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BADUNG**

**I Gusti Ayu Ratih Dwi Artatik¹
Ni Wayan Alit Erlina Wati²
Putu Nuniek Hutnaleontina³**

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi Bisnis dan Pariwisata Universitas Hindu Indonesia
e-mail : ratihiga63@gmail.com

ABSTRAK

The Government Regulation regarding Government Accounting Standards states that financial statements are structured reports of financial position and transactions conducted by a reporting entity. The quality of financial reports can be said to be of quality if they can meet the qualitative characteristics of financial statements contained in Government Regulation Number 71 of 2010 concerning Government Accounting Standards, namely: Relevant, Reliable, Comparable, Understandable. Many factors affect the quality of financial reports, this research uses internal control system variables, understanding of government accounting standards, regional financial accounting information systems, and regional financial management.

The main objective of this research is to find out whether there is an influence from the internal control system, understanding of government accounting standards, regional financial accounting information systems, and regional financial management on the quality of financial reports at 38 OPDs of Badung Regency. The number of samples taken was 114 people, with purposive sampling technique. Data collection was carried out using a questionnaire. The data analysis technique used is multiple linear regression. The results showed that the application of the internal control system, understanding of government accounting standards, regional financial accounting information systems, and financial management principles had a positive effect on the quality of financial reports.

Keywords : Internal Control System, Government Accounting Standards, information, Regional Finance, Management Principles, Report Quality

Pendahuluan

Akuntansi keuangan pemerintahan daerah di Indonesia merupakan salah satu bidang dalam akuntansi sektor publik yang mendapat perhatian besar dari berbagai pihak semenjak reformasi tahun 1998. Hal tersebut disebabkan oleh adanya kebijakan baru dari pemerintah Republik Indonesia yang “mereformasi” berbagai hal, termasuk pengelolaan keuangan daerah (Abdul Halim, 2007:1). Fenomena mengenai kualitas laporan keuangan kini semakin hangat untuk diperbincangkan, banyaknya kasus-kasus buruknya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia masih menjadi isu hangat yang perlu dikaji lebih dalam. Dengan adanya Pemahaman pada SAP, maka diharapkan laporan keuangan pemerintah daerah telah disajikan secara relevan dan handal sehingga

dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Informasi akuntansi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus memenuhi karakteristik kualitatif yang sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yakni relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Selain pemahaman terhadap SAP tingginya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah juga ditentukan oleh seberapa baik pengendalian internal yang dimiliki institusi pemerintah daerah. Pengendalian intern yang lemah menyebabkan sulitnya mendeteksi kecurangan/ketidakkuratan proses akuntansi sehingga bukti audit yang diperoleh dari data akuntansi menjadi tidak kompeten (Winidyaningrum, 2009). Setiap tahunnya Badan Pemeriksaan keuangan (BPK) memberikan opini untuk laporan keuangan, terdapat 4 (empat) opini yang diberikan dalam pemeriksaan yaitu : Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TW) dan Pernyataan Menolak Memberikan Opini atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Berikut perkembangan opini BPK RI terhadap LKPD Provinsi/Kabupaten/Kota di Provinsi Bali bisa dilihat pada Tabel 1.

**Tabel 1.1 Perkembangan Opini BPK RI terhadap LKPD
Provinsi/Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2010-2016**

No	Entitas	Opini LKPD						
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Prov. Bali	WDP	WDP	WDP	TW	WTP	WTP	WTP
2	Kab. Badung	WDP	WDP	WTP	TMP	WTP	WTP	WTP
3	Kab. Bangli	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP
4	Kab. Buleleng	TMP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
5	Kab. Gianyar	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
6	Kab. Jembrana	TW	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
7	Kab. Karangasem	TMP	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
8	Kab. Klungkung	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP

9	Kab. Tabanan	WDP	WDP	TMP	WDP	WTP	WTP	WTP
10	Kota Denpasar	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber : Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI), 2017

Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah juga sangat penting dalam menciptakan laporan keuangan yang berkualitas. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 mengenai Sistem Informasi keuangan Daerah bahwa Penerapan sistem informasi akuntansi keuangan daerah merupakan penerapan sistem mulai dari pengelompokan, penggolongan, pencatatan dan pemrosesan aktivitas keuangan pemerintah daerah ke dalam sebuah laporan keuangan sebagai suatu informasi yang nantinya dapat digunakan oleh pihak tertentu dalam pengambilan keputusan oleh masing-masing OPD dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Saat ini OPD telah memanfaatkan teknologi informasi yang menghasilkan suatu sistem informasi, dimana menyediakan informasi mengenai keuangan daerah yang dapat diakses, dikelola dan didayagunakan oleh berbagai pihak dan masyarakat luas. Sistem informasi tersebut dikenal dengan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD).

Penentu lainnya yaitu dapat menentukan tinggi rendahnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah Pengelolaan keuangan daerah, Pengelolaan keuangan daerah harus transparansi yang mulai dari proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan anggaran daerah. Selain itu, akuntabilitas dalam pertanggungjawaban publik juga diperlukan, dalam arti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Dengan adanya penerapan prinsip-prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah, maka akan menghasilkan pengelolaan keuangan daerah yang benar-benar mencerminkan kepentingan dan pengharapan masyarakat daerah setempat secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.

Fenomena yang terjadi pada saat ini dimana pelaporan keuangan pemerintah daerah suatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Kenyataan di dalam laporan keuangan pemerintah daerah masih banyak disajikan data-data yang tidak sesuai dan masi terdapat banyak penyimpangan yang ditemukan oleh BPK-RI

dalam melaksanakan audit laporan keuangan pemerintah. Laporan keuangan pemerintah daerah yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian menjadi suatu yang penting untuk dikaji, mengingat laporan keuangan pemerintah daerah masih dibawah target rencana pembangunan. Permasalahan juga ditemukan diantaranya 1). Pencatatan tidak/belum dilakukan secara akurat, 2). Proses penyusunan laporan keuangan tidak sesuai dengan ketentuan, 3). Keterlambatan menyampaikan laporan keuangan (Silviana 2014). Berdasarkan dari fenomena diatas dapat dinyatakan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah masih belum memenuhi kriteria nilai informasi yang disyaratkan . Dapat disimpulkan bahwa masih terdapat laporan keuangan pusat maupun daerah masih jauh dari kriteria kualitatif laporan keuangan , padahal pemerintah membutuhkan informasi laporan keuangan daerah maupun pusat secara tepat waktu dan andal.

Dalam laporan keuangan pemerintah khususnya bali masih banyak disajikan data-data yang tidak sesuai. Selain itu masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dalam audit laporan keuangan pemerintah (kiranayanti 2016). Adapun faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah diantaranya : sistem pengendalian intern , Pemahaman standar akuntansi pemerintah , sistem informasi akuntansi keuangan daerah , dan prinsip pengelolaan keuangan daerah. Dari faktor tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti “Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern, Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah, Dan Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah . Penelitian ini akan dilakukan Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Badung karena kabupaten badung mempunyai banyak tempat-tempat wisata yang menghasilkan pajak yang sangat tinggi yang dapat mempengaruhi kualitas laporannya.

Rumusan Masalah

- 1) Apakah Penerapan Sistem Pengendalian Intern Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Badung?
- 2) Apakah Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Badung?

- 3) Apakah Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Keuangan Daerah Kabupaten Badung?
- 4) Apakah Penerapan Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kabupaten Badung?

Tujuan Penelitian

- 1) Untuk Mengetahui Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Badung.
- 2) Untuk Mengetahui Pengaruh Penerapan System Informasi Akuntansi Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Keuangan Daerah Kabupaten Badung.
- 3) Untuk Mengetahui Pengaruh Penerapan System Pengendalian Intern Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Badung.
- 4) Untuk Mengetahui Pengaruh Penerapan Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kabupaten Badung.

Manfaat Penelitian

1) Manfaat teoritis

Penelitian ini dapat memberikan tambahan referensi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai perbandingan, penyempurnaan penelitian terdahulu.

2) Manfaat Praktisi

Diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan data empiris bagi ilmu akuntansi sektor publik agar mampu memberikan pengetahuan tambahan agar menjadi referensi untuk para akademisi dan juga dapat menghimpun informasi sebagai bahan sumbangan informasi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Badung guna meningkatkan Kualitas dan Kinerja dalam penyusunan Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Badung.

KAJIAN PUSTAKA

Sistem Pengendalian Intern

Sistem pengendalian intern adalah kebijakan yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi manajemen bahwa organisasi mencapai tujuan dan sasaran. Dengan adanya SPIP tersebut diharapkan dapat menciptakan kondisi dimana terdapat budaya pengawasan terhadap seluruh organisasi dan kegiatan sehingga dapat mendeteksi sejak dini terjadi kemungkinan penyimpangan serta meminimalisir terjadinya tindakan yang dapat merugikan negara. Pengendalian intern memiliki unsur-unsur yang diterapkan di pemerintah menurut Pemandagri No 60 tahun 2008 terdiri atas unsur :

(1).Lingkungan pengendalian, (2).Penilaian resiko , (3).Kegiatan Pengendalian, (4).Informasi dan Komunikasi, (5).Pemantauan Pengendalian Intern.

Standar Akuntansi Pemerintah

Standar akuntansi sangat diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam pelaporan keuangan. Apabila tidak ada standar akuntansi yang memadai akan menimbulkan implikasi negatif berupa rendahnya reliabilitas dan objektivitas informasi yang disajikan, inkonsistensi dalam pelaporan keuangan serta menyulitkan pengauditan (Sari, 2014). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pasal 1 ayat 3 menyatakan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah serta didalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pasal 1 ayat 4 menyatakan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), adalah Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang diberi judul, nomor, dan tanggal efektif. Adapun PSAP berikut: (a) PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan, (b) PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas, (c)PSAP 03 Laporan Arus Kas , (d)PSAP 04 Catatan Atas Laporan Keuangan, (e) PSAP 05 Akuntansi Persediaan,(f) PSAP 06 Akuntansi Investasi , (g) PSAP 07 Akuntansi Aset Tetap , (h) PSAP 08 Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan , (i) PSAP 09 Akuntansi Kewajiban, (j) PSAP 10 Koreksi Kesalahan, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan, (k) PSAP 11 Laporan Keuangan Konsolidasian , (l) PSAP 12 Laporan Operasional .

Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah

Sistem informasi merupakan suatu kumpulan data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan berarti bagi penerima (Subhan, 2012:17) dalam penelitian lina Yuliana (2016) Akuntansi keuangan daerah adalah bidang akuntansi yang mempunyai ruang lingkup sistem akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, perencanaan keuangan, sistem pengawasan dan pemeriksaan, serta berbagai implikasi finansial atas kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah suatu daerah. Tujuan pemerintah menyelenggarakan SIKD : (1). Membantu kepala daerah dalam menyusun anggaran daerah dan laporan pengelolaan keuangan daerah, (2). Membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan keuangan daerah, (3). Membantu kepala daerah dan instansi terkait lainnya melakukan evaluasi kinerja keuangan daerah, (4). Membantu menyediakan kebutuhan keuangan statistik daerah, (5). Menyajikan informasi keuangan daerah secara terbuka kepada masyarakat, (6). Mendukung penyediaan informasi akuntansi keuangan yang dibutuhkan oleh SIKD secara nasional.

Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah. Menurut Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2011 No.2 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah meliputi: (1). Efisien, (2). Ekonomis, (3). Efektif, (4). Transparan, (5). Bertanggung jawab, (6). Keadilan, (7). Kepatutan.

Kualitas Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut (SAK, 2009). Oleh karena itu, informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus bermanfaat dan

sesuai dengan kebutuhan para pemakai. Kualitas laporan keuangan dapat dikatakan berkualitas jika dapat memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan yang terdapat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu: **1)Relevan:**(a).Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*), (b).Memiliki manfaat prediktif (*prediktive value*), (c).Tepat waktu (*timeliness*), (d).Lengkap. **2)Andal:** (a).Penyajian jujur, (b).Dapat diverifikasi, (c).Netralitas. **3)Dapat dibandingkan.** **4)Dapat dipahami.**

Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Lapora Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas-Dinas Di Pemerintah Kabupaten Jembrana) yaitu menurut Ni Putu Yogi Merta Maeka Sari,Dkk (2014) menyatakan bahwa pemahaman standar akuntansi pemerintahan dan penerapan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Anita Ugun (2014) mengenai Pengaruh Sistem Informasi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah .(Survey Pada Dinas Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah kota Bandung) yakni menunjukkan bahwa Sistem Informasi Keuangan Daerah berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah . Penelitian yang dilakukan oleh Febriyanti Moha, Lintje Kalangi, Jessy D.L Warongan (2017) terkait Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Bolaang Mongodow Selatan menunjukkan bahwa Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Hipotesis

Penerapan sistem pengendalian intern yang memadai dapat mendukung untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat diandalkan dalam pengambilan

keputusan . Menurut Elder, Beasley, Arens dan Yusuf (2011:316) sistem pengendalian internal terdiri dari kebijakan dan prosedur yang dirancang agar manajemen mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa perusahaan mencapai tujuan dan sasarnya. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut: H1 : Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Badung.

Pemahaman terhadap standar akuntansi pemerintahan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, Rahmayati (2012:21) yang mengemukakan bahwa penempatan pegawai sesuai latar belakang pendidikannya, yaitu pegawai yang berlatar belakang pendidikan ekonomi akuntansi sebagai staf penyusun laporan keuangan akan menjadikan laporan keuangan yang dihasilkan berkualitas. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut: H2: Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berpengaruh terhadap kualitas Laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Badung.

Dalam penelitian sari dkk, (2014) mengemukakan bahwa sistem informasi akuntansi keuangan daerah merupakan penerapan sistem mulai dari pengelompokan , penggolongan, pencatatan , dan pemrosesan aktivitas keuangan daerah kedalam laporan keuangan sebagai informasi yang nantinya dapat digunakan pihak tertentu dalam pengambilan keputusan oleh masing masing OPD dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H3: Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap kualitas Laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Badung.

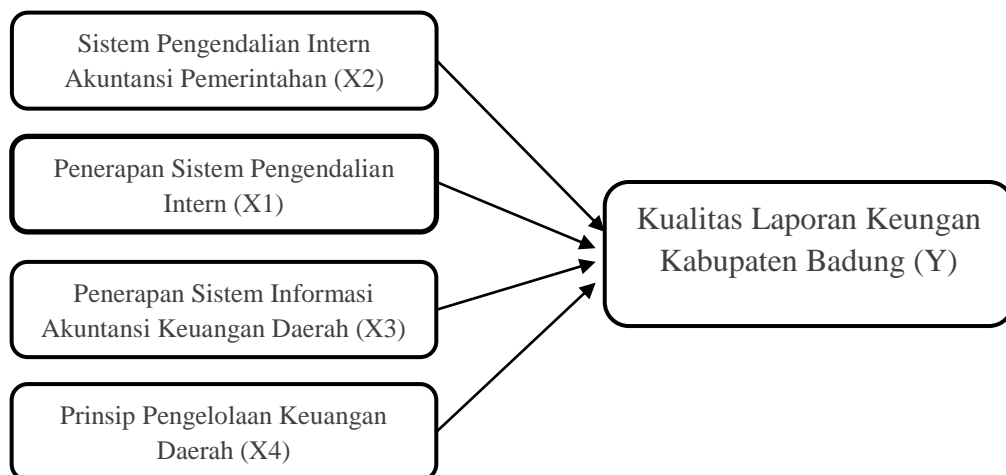
Menurut Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2011 No.2 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan

memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat, yang dimaksud secara tertib adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H4 : Prinsip Pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

METODELOGI PENELITIAN

Desain penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif menekankan pada pengujian teori melalui variable-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik. Penelitian ini dikategorikan sebagai *explanatory research*, dimana menjelaskan hubungan kausal antara variable-variabel penelitian melalui pengujian hipotesis. Dapat dilihat desain penelitian sebagai berikut:



Secara operasional variable-variabel tersebut dapat didefinisikan sebagai berikut ini: Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern merupakan proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai. Dengan menggunakan indikator yang mengacu pada Pemendagri No 60 tahun 2008 terdiri atas unsur : (1).Lingkungan pengendalian, (2).Penilaian resiko , (3).Kegiatan Pengendalian, (4).Informasi dan Komunikasi, (5).Pemantauan Pengendalian Intern.

Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Maka adapun PSAP berikut sebagai indikator: (a) PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan, (b) PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas, (c) PSAP 03 Laporan Arus Kas, (d) PSAP 04 Catatan Atas Laporan Keuangan, (e) PSAP 05 Akuntansi Persediaan, (f) PSAP 06 Akuntansi Investasi, (g) PSAP 07 Akuntansi Aset Tetap, (h) PSAP 08 Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan, (i) PSAP 09 Akuntansi Kewajiban, (j) PSAP 10 Koreksi Kesalahan, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan, (k) PSAP 11 Laporan Keuangan Konsolidasian, (l) PSAP 12 Laporan Operasional.

Sistem informasi keuangan daerah (SIKD) merupakan sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah serta data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat guna sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah (PP No.56 Tahun 2005). Dalam variabel ini yang menjadi indikator penilaian adalah (1)Tingkat kecepatan, (2) tingkat keamanan, (3) tingkat efisiensi, (4) tingkat kualitas hasil.

Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah. Kebijakan yang dihasilkan harus dapat diakses dan dikomunikasikan secara vertikal maupun horizontal dengan pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah dengan ekonomis, efektif, dan efisien. prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah indikatornya meliputi: (1).Efisien, (2).Ekonomis, (3).Efektif, (4).Transparan, (5).Bertanggung jawab, (6).keadilan, (7). Kepatutan.

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan karakteristik kualitatif laporan keuangan yang terdapat dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP, diukur dengan skala likert lima dengan menggunakan lima indikator yang mengacu pada PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP yang akan menjadi instrumen pertanyaan yaitu : (1).Laporan keuangan disajikan dengan relevan, (2).Andal, (3).Dapat dipahami, (4). Dapat dibandingkan.

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah OPD Kabupaten Badung sebanyak 38 OPD dengan jumlah 8.250 orang.

Metode penentuan sampel yang digunakan didalam penelitian ini yakni teknik purposive sampling, sugiono (2014:122). Kriteria penentuan sampel yang digunakan didalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Pegawai yang menduduki jabatan sebagai kepala bagian/sub keuangan, bendahara, staf pencatatan akuntansi.
- 2) Pegawai yang menduduki jabatan lebih dari 1 tahun.

Sesuai dengan kriteria tersebut diperoleh besarnya sampel sebanyak 114 orang.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan adalah cara perhitungan menggunakan bantuan *software SPSS* untuk melakukan pengujian statistic. Teknik analisis yang digunakan adalah sebagai berikut.

Uji Kualitas Data, terdiri dari: Uji Validitas merupakan tes yang relevan dengan tujuan yang akan diukur. Dengan penentuan layak atau tidaknya suatu item pertanyaan dengan melihat dari nilai koefisien korelasi butir item pertanyaan yang diuji lebih besar dari 0.3 . Uji Reliabilitas yakni Suatu instrumen *reliable* atau handal apabila memiliki koefisien alpha (α) lebih besar dari 0.60 (Sugiyono,2011:172). Setelah diketahui validitas dan reabilitas instrument penelitian, maka selanjutnya baru dilakukan analisis data.

Uji Statistik Deskriptif yakni untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul Statistik deskriptif disajikan untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel-variabel penelitian, yaitu jumlah sampel, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata dan standar deviasi.

Uji Asumsi Klasik yang terdiri dari : Uji Normalitas untuk menguji apakah data yang akan digunakan dalam model regresi berdistribusi normal atau tidak: Jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa distribusi residual data penelitian adalah normal. Jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa distribusi residual data penelitian tidak normal. Uji Multikolinearitas untuk menguji apakah di dalam modelregresi di temukan

adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Suatu model regresi dikatakan bebas dari multikolinieritas apabila nilai tolerance diatas 0,1 dan variance inflation value atau nilai VIF masing-masing variabel di bawah 10. Uji Heteroskedastisitas Jika titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur, maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Jika titik ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi Heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linier Berganda untuk mengetahui besarnya Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah, Pengendalian Intern Dan Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah Kualitas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Badung. Regresi linier berganda dinyatakan dengan rumus:

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + b_4x_4$$

Keterangan :

Y = Kualitas Laporan Keuangan

a = Konstanta

X₁ = Sistem Pengendalian Intern

X₂ = Standar Akuntansi Pemerintah

X₃ = Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah

X₄ = Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah

b₁,b₂,b₃,b₄ = Koefisien Regresi

Pengujian Hipotesis : Uji Koefisien determinasi (R²) Dalam perhitungan statistik ini, nilai R² yang digunakan adalah Adjusted R Square benar-benar menunjukkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen koefisien determinasi atau kuadrat dari koefisien determinasi = 1 berarti variabel independen berpengaruh secara sempurna terhadap variabel dependen dan jika koefisien determinasi 0 = berarti variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

Uji t (t-test) pengujian terhadap koefisien regresi secara parsial untuk mengetahui antara variabel bebas terhadap variabel terikat dengan

mengasumsikan variabel bebas lain dianggap sebagai konstanta, Jika signifikansi $> 0,05$ maka H_0 diterima, Jika signifikansi $< 0,05$ maka H_0 ditolak.

Uji F (F-test) Dipergunakan untuk menguji nyata tidaknya pengaruh variabel bebas secara Simultan terhadap variabel terikat (Imam Ghazali, 2008). (a) H_0 dan H_a $H_0: E1 = 0$ (tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen dan variabel dependen) $H_a: E1 \neq 0$ (terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen dan variabel dependen) (b) Menentukan Level of Significance Level of Significance yang digunakan sebesar 5% atau $(\alpha) = 0,05$,(d) Penerimaan dan penolakan H_0 , dengan melihat tingkat probabilitasnya, yaitu Jika Signifikansi $< 0,05$ maka H_0 ditolak , Jika Signifikansi $> 0,05$ maka H_0 diterima.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik responden merupakan analisis deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan karakter dari populasi. Dalam penelitian ini mendeskripsikan karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, jabatan, , pendidikan, jurusan dan masa kerja. Dari tabel diatas terlihat bahwa responden yang berjenis kelamin laki- laki sebanyak 40 orang atau 35,08% dan responden yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 74 orang atau 64,91%. Hal ini menunjukkan responden perempuan lebih dominan dibandingkan dengan responden laki-laki.

Hasil Pengujian Instrumen Penelitian

Menurut Sugiyono (2017) syarat minimum memenuhi syarat valid adalah kalau r -batas $\geq 0,3$. Instrumen penelitian dinyatakan valid harus memiliki r *Pearson Correlation* $\geq 0,30$. Pada tabel 4.2 menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai koefisien korelasi dengan skor total seluruh item pernyataan lebih besar dari 0,30. Hal ini menunjukkan butir-butir pernyataan dalam instrument penelitian tersebut valid. Maka dapat disimpulkan bahwa seluruh pernyataan dalam kuisisioner telah memenuhi syarat validitas data dan kuisisioner dapat dijadikan sebagai instrumen penelitian.

Menurut Ghazali (2016) uji reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuisisioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuisisioner dikatakan reliabel jika jawaban seseorang konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Instrumen dalam variabel dapat dikatakan reliabel jika memberikan nilai

cronbachs alpha > 0,70. Hasil uji reliabilitas 3 terlihat bahwa *Alpha Cronbachs* > 0,70 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel telah memenuhi syarat reliabilitas data.

Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Hasil pengolahan data untuk deskriptif variabel penelitian disajikan dalam bentuk tabel seperti berikut ini.

Tabel 4.1 Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	114	29,00	45,00	35,8947	3,38494
X2	114	41,00	60,00	52,2018	5,64304
X3	114	14,00	25,00	20,5877	2,85276
X4	114	27,00	40,00	34,5526	3,39206
Y	114	33,00	43,00	38,0263	2,19598
Valid N (listwise)	114				

Su

mber : Data diolah(2020). Lampiran 4

Berdasarkan Tabel 4.4 di atas dapat dilihat, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sistem pengendalian intern (X1) menunjukkan nilai minimum adalah 29 dan nilai maksimumnya adalah 45. Mean sebesar 35,89, hal ini berarti rata-rata sistem pengendalian intern sebesar 35,89. Standar deviasinya 3,38 .
2. Pemahaman standar akuntansi pemerintah (X2) menunjukkan nilai minimum adalah 41 dan nilai maksimumnya adalah 60. Mean sebesar 52,20, hal ini berarti rata-rata pemahaman standard akuntansi pemerintah sebesar 52,20. Standar deviasinya 5,64 .
3. Sistem informasi akuntansi keuangan daerah (X3) menunjukkan nilai minimum adalah 14 dan nilai maksimumnya adalah 25. Mean sebesar 20,58, hal ini berarti rata-rata sistem informasi akuntansi keuangan daerah sebesar 20,58. Standar deviasinya 2,85 .
4. Prinsip pengelolaan keuangan daerah (X4) menunjukkan nilai minimum adalah 27 dan nilai maksimumnya adalah 40. Mean sebesar 34,55, hal ini

berarti rata-rata prinsip pengelolaan keuangan daerah sebesar 34,55. Standar deviasinya 3,39.

5. Kualitas laporan keuangan (Y) menunjukkan nilai minimum adalah 33 dan nilai maksimumnya adalah 43. Mean sebesar 38,02, hal ini berarti rata-rata kualitas laporan keuangan sebesar 38,02. Standar deviasinya 2,19.

Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Normalitas

Tabel 4.5 Hasil Uji Normalitas

Kolmogorov-Smirnov	Unstandardized Residual
N	114
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,187

Sumber : Data diolah(2020). Lampiran 5

Berdasarkan tabel 4.5 terlihat nilai signifikansi Asymp. Sig. (2-tailed) 0,187 yang lebih besar dari 0,05. Kesimpulannya adalah data dalam penelitian ini berdistribusi secara normal.

Hasil Uji Multikolinieritas

Tabel 4.6 Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	X1	,989	1,012
	X2	,983	1,017
	X3	,958	1,044
	X4	,953	1,050

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Data diolah(2020). Lampiran 5

Pada tabel diatas menunjukkan hasil uji multikolinieritas semua variabel memiliki nilai tolerance > 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10. Maka disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas antara variabel bebas dalam model regresi.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4.7 Uji Uji Heteroskedastisitas

No	Variabel	Sig	Keterangan
1.	X1	0,548	Bebas Heteroskedastisitas
2.	X2	0,769	Bebas Heteroskedastisitas
3.	X3	0,190	Bebas Heteroskedastisitas
4.	X4	0,641	Bebas Heteroskedastisitas

Sumber : Data diolah(2020). Lampiran 5

Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai signifikan variabel sistem pengendalian intern, pemahaman standar akuntansi pemerintah, sistem informasi akuntansi keuangan daerah, prinsip pengelolaan keuangan daerah, lebih dari 0,05 ,maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas.

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis ini digunakan untuk menghitung pengaruh sistem pengendalian intern, pemahaman standar akuntansi pemerintah, sistem informai akuntansi keuangan daerah dan prinsip pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil analisis dinyatakan dalam bentuk persamaan garis:

Table Hasil 4.8 Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel	Standardized Beta	t	Probabilitas (sig).	Keterangan
Konstanta	1,753	0,856	0,394	
Sistem pengendalian intern (X1)	0,310	9,814	0,000	Signifikan
Pemahaman standar akuntansi pemerintah (X2)	0,191	10,035	0,000	Signifikan
Sistem informasi akuntansi keuangan daerah (X3)	0,230	6,035	0,000	Signifikan
Prinsip pengelolaan keuangan daerah (X4)	0,302	9,417	0,000	Signifikan
Adjust R Square	0,735			
F Statistik	9,33			
Probabilitas (p-value)	0,000			Signifikan

Sumber : Data diolah(2020). Lampiran 6

Berdasarkan Tabel 4.7 dapat dibuat suatu model persamaan regresi yaitu sebagai berikut :

$$Y = 1,753 + 0,310 X_1 + 0,191 X_2 + 0,230 X_3 + 0,302 X_4$$

Nilai konstanta (a) sebesar 1,753 Artinya apabila tidak memperhatikan sistem pengendalian intern, pemahaman standar akuntansi pemerintah, sistem informasi akuntansi keuangan daerah, prinsip pengelolaan keuangan daerah maka besarnya kualitas laporan keuangan sebesar 1,753.

Nilai koefisien (b₁) Sistem Pengendalian Intern (X₁) menunjukkan nilai koefisien yang positif sebesar 0,310, Kualitas Laporan Keuangan (Y) akan meningkat apabila sistem pengendalian intern meningkat dengan asumsi variabel lainnya dianggap konstan.

Nilai koefisien (b₂) Standar Akuntansi Pemerintah (X₂) menunjukkan nilai koefisien yang positif sebesar 0,191, Kualitas Laporan Keuangan (Y) akan meningkat apabila pemahaman standar akuntansi pemerintah meningkat dengan asumsi variabel lainnya dianggap konstan.

Nilai koefisien (b₃) Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah (X₃) menunjukkan nilai koefisien yang positif sebesar 0,230, Kualitas Laporan Keuangan akan meningkat apabila sistem informasi akuntansi keuangan (Y) daerah meningkat dengan asumsi variabel lainnya dianggap konstan.

Nilai koefisien (b₄) Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah (X₄) menunjukkan nilai koefisien yang positif sebesar 0,302, Kualitas Laporan Keuangan (Y) akan meningkat apabila prinsip pengelolaan keuangan daerah meningkat dengan asumsi variabel lainnya dianggap konstan.

Hasil Koefisien Determinasi (R²)

Nilai *adjusted* R² sebesar 0,735, ini berarti sebesar 73,5 persen sistem pengendalian intern, pemahaman standar akuntansi pemerintah, sistem informasi akuntansi keuangan daerah, prinsip pengelolaan keuangan daerah mempengaruhi kualitas laporan keuangan sedangkan sisanya sebesar 36,5 persen dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian.

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Nilai F_{hitung} sebesar 9,33 dengan signifikansi pada pengujian F sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Ini berarti bahwa ada pengaruh antara sistem pengendalian intern, pemahaman standar akuntansi pemerintah, sistem informasi akuntansi keuangan daerah, prinsip pengelolaan keuangan daerah secara bersama-sama terhadap kualitas laporan keuangan. Sehingga model dapat dikatakan layak.

Hasil Analisis t-test

1) Pengujian Hipotesis Pertama

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai t_{hitung} 9,814 signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Yang berarti H_1 diterima yang menyatakan Sistem Pengendalian Intern (X_1) berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

2) Pengujian Hipotesis Kedua

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai t_{hitung} pada variabel Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah nilai t_{hitung} sebesar 10,035 dengan signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Yang berarti H_2 diterima yang menyatakan standar akuntansi pemerintah (X_2) berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

3) Pengujian Hipotesis Ketiga

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai t_{hitung} pada variabel Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah t_{hitung} sebesar 6,035 dengan signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Yang berarti H_3 diterima yang menyatakan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah (X_3) berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y).

4) Pengujian Hipotesis Keempat

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai t_{hitung} pada variabel Pengelolaan Keuangan Daerah t_{hitung} sebesar 9,417 dengan signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Yang berarti H_4 diterima yang menyatakan Pengelolaan Keuangan Daerah (X_4) berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y).

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

1) Penerapan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien regresi **0,310** dengan taraf signifikansi penelitian untuk variabel penerapan sistem pengendalian intern(X_1) terhadap kualitas laporan keuangan daerah(Y) sebesar sig (0,00) < 0,05 sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima, dengan demikian dapat diartikan bahwa semakin tinggi penerapan sistem pengendalian intern maka semakin

tinggi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Badung. Penerapan sistem pengendalian intern yang memadai dapat mendukung untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat diandalkan dalam pengambilan keputusan . Menurut Elder, Beasley, Arens dan Yusuf (2011:316) yang mengemukakan bahwa sistem pengendalian internal terdiri dari kebijakan dan prosedur yang dirancang agar manajemen mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa perusahaan mencapai tujuan dan sasarnya.

2) Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien regresi 0,191 dengan taraf signifikansi penelitian untuk variabel pemahaman standar akuntansi pemerintah(X2) terhadap kualitas laporan keuangan daerah(Y) sebesar sig (0,00) < 0,05 sehingga H0 ditolak dan H2 diterima, dengan demikian dapat diartikan bahwa semakin tinggi pemahaman standar akuntansi pemerintah maka semakin tinggi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Badung. Pemahaman terhadap standar akuntansi pemerintahan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, Rahmayati (2012:21) yang mengemukakan bahwa penempatan pegawai sesuai latar belakang pendidikannya, yaitu pegawai yang berlatar belakang pendidikan ekonomi akuntansi sebagai staf penyusun laporan keuangan akan menjadikan laporan keuangan yang dihasilkan berkualitas.

3) Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien regresi 0,230 dengan taraf signifikansi penelitian untuk variabel sistem informasi akuntansi keuangan daerah(X3) terhadap kualitas laporan keuangan daerah(Y) sebesar sig (0,00) < 0,05 sehingga H0 ditolak dan H3 diterima, dengan demikian dapat diartikan bahwa semakin tinggi sistem informasi akuntansi keuangan daerah maka semakin tinggi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Badung. Yang artinya Laporan keuangan yang dihasilkan dari sitem informasi keuangan daerah yang terintegrasi akan lebih cepat, mudah dan akurat. Dalam penelitian sari dkk, (2014) mengemukakan bahwa sistem informasi akuntansi keuangan daerah

merupakan penerapan sistem mulai dari pengelompokan , penggolongan, pencatatan , dan pemrosesan aktivitas keuangan daerah kedalam laporan keuangan sebagai informasi yang nantinya dapat digunakan pihak tertentu dalam pengambilan keputusan oleh masing masing OPD dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

4) Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien regresi 0,032 dengan taraf signifikansi penelitian untuk variabel prinsip pengelolaan keuangan daerah(X4) terhadap kualitas laporan keuangan daerah(Y) sebesar sig (0,00) < 0,05 sehingga H0 ditolak dan H4 diterima, dengan demikian dapat diartikan bahwa semakin tinggi prinsip pengelolaan keuangan daerah maka semakin tinggi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Badung. Menurut Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2011 No.2 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah . Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat, yang dimaksud secara tertib adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, maka disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Penerapan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Badung diperoleh taraf signifikansi $0,000 < 0,05$, sehingga H0 ditolak dan H1 diterima.

- 2) Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Badung diperoleh taraf signifikansi $0,000 < 0,05$, sehingga H_0 ditolak dan H_2 diterima.
- 3) Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Badung diperoleh taraf signifikansi $0,000 < 0,05$, sehingga H_0 ditolak dan H_3 diterima.
- 4) Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Badung diperoleh taraf signifikansi $0,000 < 0,05$, sehingga H_0 ditolak dan H_4 diterima.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa saran yang dapat dipertimbangkan yaitu:

Bagi Dinas di Pemerintah Kabupaten Badung :Diharapkan dapat terus meningkatkan sistem pengendalian intern , pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan, sistem informasi akuntansi keuangan daerah , dan pengelolaan keuangan daerah yang dimiliki oleh Instansi dan staf terkait dengan melalui program pelatihan untuk menambah wawasan melalui workshop maupun kesempatan pengembangan diri melalui seminar agar Kualitas Laporan Keuangan Daerah yang dihasilkan dari pemerintah dapat ditingkatkan.

Bagi Peneliti Selanjutnya : Untuk menambahkan variabel-variabel lain yang diduga berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah dan memperluas cakupan penelitian, misalnya kabupaten dan kota lain di luar Kabupaten Badung sehingga bisa terlihat aspek Kualitas Laporan Keuangan Daerah secara menyeluruh.

Daftar pustaka

Abdul Halim. 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat.

- Anita Ugun. 2014. Pengaruh Sistem Informasi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (survey pada dinas pengelolaan, keuangan, dan aset daerah kota Bandung). Skripsi. Universitas Komputer Indonesia.
- Febriyanti Moha.,L.Kalangi.,J.D.L.Warongan,Pengaruh Sistem Pengendalian InternPengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Issn 2303-1174F.....1359Jurnal EMBA Vol.5 No.2 Juni 2017, Hal. 1359 –1370
- Ghozali, Imam. 2008. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS.
- Ghozali, Imam. 2016. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8). Cetakan ke VIII. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ikatan Akuntansi Indonesia,2009, Standar Akuntansi Keuangan,PSAK No.01 : Penyajian Laporan Keuangan . Jakarta : Salemba Empat
- Lina Yuliana .2016. *Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, Pengalaman Kerja Dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualiatas Laporan Keungan Pemerintah Daerah* (Studi Empiris pada Dinas pendapatan Pengelolaan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo)
- Kiranayanti, Ida Ayu Enny.dkk.2016. *Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Pemahaman Basis Akrual Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Issn: 2302-8556. Vol.16.2
- Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005. *Tentang Sistem Informasi keuangan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 *Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*.
- Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 *Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah*.
- Peraaturan Pemerintah Daerah No.02 Tahun 2011 *Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Badung*

Subhan, Mohamad. 2012. *Analisa Perancangan Sistem*. Jakarta : Lentera Ilmu Cendikia.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV.

Silviana dan Erwin Antoni. 2014. *Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Survey Pada Pemerintah Kabijpaten Di Seluruh Jawa Barat*, Universitas Widyatama Bandung, dalam Jurnal Manajemen, Vol.6 No.1: hal.1-6

Sari, Ni Putu Yogi Merta Maeka, I Made Pradana Adiputra dan Edy Sujana. 2014. Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada DinasDinas di Pemerintah Kabupaten Jembrana). *e-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program SI (Volume 2 No. 1 Tahun 2014)*.

Wati, Kadek Desiana.dkk. 2014. *Pengaruh Kompetensi Sdm, Penerapan Sap, Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah*. E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha. Volume 2 No: 1 2014

Widyaningrum, Rahmawati. 2010. *Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Informasi Teknologi Pemanfaatan Keandalan dan Ketepatanwaktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel intervening Pengendalian Internal Akuntansi*. SNA XIII Purwokerto.

www.badungkab.go.id

www.bpk.go.id